

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Amin Suprihatini, 2018, *Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Cempaka Putih.

----- dan Zainal Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan*

Prospek, Pustaka Pelajar.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar

Grafika.

Fadjar, Mukthie A, 2013, *Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*,

Malang: Setara Press

Fajrurahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta:

Kencana.

-----, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar

Grafika.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia

Pustaka Utama.

Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan*

Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasif, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.

Parulian Donald, 1997, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Grasindo.

Rudi Salam Sinaga, 2013, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharizal, 2011, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Syahrial Syarbaini, dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4

Zainuddin Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/

PP.04.2- Kpt/ 01/ KPU/ X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-Kpt/ 03/ KPU/

II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara salam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota.

C. Website

Eko Prasajo, dkk, 2006, Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara

Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural. Departemen Ilmu

Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas

Indonesia.

Guru Pendidikan, 2019, PILKADA : Pengertian, Sejarah, Tujuan, Asas,
Syarat, Manfaat, Makna, & Tahapannya Lengkap,

<https://seputarilmu.com/2019/04/pilkada-adalah.html>

Hamdan Zoelva, 2011, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan
Demokrasi, Universitas Muria Kudus: Makalah Seminar Nasional.

Meidy Yafeth Tinangon, 2018, PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-
Undangan, <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU->

[dalam-Hirarki-Peraturan-Perundang-undangan](https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan-Perundang-undangan) , diakses pada tanggal 1
Januari 2021.

Suparman Marzuki, 2008, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas
Pemilu yang Demokratis, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15

Yusdianto, 2010, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah
(Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiannyaI. Jurnal Konstitusi
Vol II nomor 2.

